

A B S T R A K

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK GRATIS UNTUK MASYARAKAT KURANG MAMPU SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA MEDAN (Studi Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli)

N a m a : Normalina Tiodora
N P M : 111801001
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Prof. Dr. Zainuddin, M.Pd
Pembimbing II : Dr. Heri Kusmanto, MA

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi Peraturan Pemerintah Walikota terhadap pemberian kartu keluarga dan kartu tanda penduduk gratis kepada masyarakat. Berdasarkan keadaan tersebut maka penelitian ini mengetengahkan permasalahan tentang bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Walikota tentang pemberian kartu keluarga dan kartu tanda penduduk gratis untuk masyarakat sebagai upaya peningkatan pelayanan publik di Kota Medan (Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli) dan hambatan Pemerintah Kota Medan dalam pengimplementasian Peraturan Pemerintah Walikota tentang pemberian kartu keluarga dan kartu tanda penduduk gratis untuk masyarakat.

Bentuk penelitian ini menitik beratkan pada proses, deskripsi analisis, yang bertujuan untuk mengetahui kebijakan yang diambil sehubungan dengan implementasi Peraturan Pemerintah Walikota tentang pemberian kartu keluarga dan kartu tanda penduduk gratis untuk masyarakat sebagai upaya peningkatan pelayanan publik di Kota Medan (Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli).

Hasil penelitian ini menjelaskan Implementasi dalam pemberian kartu keluarga dan kartu tanda penduduk gratis untuk masyarakat masih belum terlaksana secara efektif. Masih banyak masyarakat yang belum benar-benar mengerti prosedur pemberian kartu keluarga dan kartu tanda penduduk gratis. Pelaksanaan pemberian kartu keluarga dan kartu tanda penduduk gratis masih belum optimal dilakukan. Berdasarkan keberperanan empat unsur penentu keberhasilan implementasi kebijakan, setiap unsur dapat dipenuhi walaupun belum sempurna. Masih banyak kekurangan dalam unsur komunikasi dan struktur birokrasi. Penyampaian pesan yang tidak sempurna karena banyak alur yang harus dilalui dan ketidakjelasan pesan membuat pegawai (PNS) bingung akan program yang sebenarnya. SOP yang tidak konsisten, yang selalu berubah-ubah setiap tahunnya menyulitkan pegawai (PNS) untuk menyesuaikan diri dengan aturan yang selalu baru.

Kata Kunci: Implementasi, KK KTP, Gratis

A B S T R A C T

IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION ON GRANTING THE MAYOR'S FAMILY CARD AND IDENTITY FREE TO THE POOR AS AN EFFORT TO IMPROVE PUBLIC SERVICE IN MEDAN

(Studies Villages Downstream Glorious Headland Terrain District Deli)

N a m e : Normalina Tiodora
N P M : 111801001
Study Program : Master of Public Administration
Supervisor I : Prof. Dr. Zainuddin, M.Pd
Supervisor II : Dr. Heri Kusmanto, MA

This study reviews the implementation of Government Regulation concerning the provision of services family card and identification cards free of charge, especially to the poor. Based on these circumstances, this study explores the question of how implementation of Government concerning the provision of services family card and identification cards free of charge to the poor as an effort to improve public services in the city of Medan and what challenges and obstacles in the implementation of the Medan City Government Mayor Government concerning the provision of services family card and identification cards free of charge to the poor.

Forms of this research focuses on the process, a description of the analysis, which aims to determine the measures taken in connection with the implementation of Government concerning the provision of services family card and identification cards free of charge to the poor as an effort to improve public services in the city of Medan.

The results of this study describes the implementation in the service provision of family cards and identity cards free of charge to the poor is still not implemented effectively. There are still many underprivileged people who do not really understand the procedures and mechanisms for the provision of services family card and an identity card for free. Implementation of service provision and the family card free identification cards are still not optimal do. Based keberperanan four key elements in determining the success of policy implementation, each element can be met even if not perfect. There are still many shortcomings in the element of communication and bureaucratic structures. Delivery of messages that are not perfect because a lot of grooves that must be passed and obscurity message to make servants (PNS) will confuse the actual program. SOP inconsistent, which is always changing every year make it difficult for an employee (PNS) to conform to the rules that are always new.

Keywords: Implementation, KK ,KTP, Underprivileged